



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 11 Maret 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIT KERJA : UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **SUYONO**
2. Jabatan : **WAKIL REKTOR I BIDANG AKADEMIK**
3. NHK : **180669**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **2.302.950.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m²/150 m² di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 318.000.000
2. Tanah Seluas 186 m² di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 57.000.000
3. Tanah Seluas 186 m² di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 57.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 33 m²/28.5 m² di KAB / KOTA KOTA JAKARTA PUSAT , HASIL SENDIRI Rp. 522.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 98 m²/36 m² di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 315.000.000
6. Tanah Seluas 2212 m² di KAB / KOTA PURWOREJO, HASIL SENDIRI Rp. 226.600.000
7. Tanah Seluas 72 m² di KAB / KOTA PURWOREJO, HASIL SENDIRI Rp. 7.350.000
8. Tanah Seluas 500 m² di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 800.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **123.350.000**

1. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2005, HASIL SENDIRI Rp. 2.350.000
2. MOBIL, TOYOTA MINIBUS Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 115.000.000



3. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2016, HASIL SENDIRI

Rp. 6.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 161.000.000

D. SURAT BERHARGA

Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 142.001.000

F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 2.729.301.000

III. HUTANG

Rp. 100.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 2.629.301.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.